



AKUNTANSI **SEKTOR PUBLIK**

Dewi Sartika
Rizky Ridwan
Paskanova Christi Gainau
Widhy Setyowati
Eliza Arshandy
Rida Perwita Sari
Hantono
Tuti Hermelinda
Ana Sopanah
Siska Aprianti
Yevi Dwitayanti
Atik Andhayani
Imanita Septian Rusdianti
Berlian Afriansyah
Imelda Sinaga
Sofyan Anshori

Editor: Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik terus mengalami transformasi dengan mengedepankan topik-topik terkini yang sejalan dengan permasalahan riil rakyat. Hal itu disebabkan perkembangan dari permasalahan mendasar dari publik kemudian bisa membangun, menciptakan dan melegalisasi teori utama yang digunakan dalam Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik tidak terbatas pada permasalahan keuangan daerah dan pemerintahan, tetapi sudah menysasar pada wilayah publik lainnya seperti komunitas dan organisasi semi terstruktur. Dengan begitu kajian Akuntansi Sektor Publik telah menempatkan kajian akuntansi menjadi salah satu teori dalam pemecahan permasalahan sektor publik. Hal ini tentu membuat Akuntansi Sektor Publik bisa digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan sektor publik dalam konteks keseharian.

Berbagai temuan baru dalam bidang Akuntansi Sektor Publik semakin berkembang dan kian menarik untuk diekplorasi dengan berbagai pendekatan keilmuan Akuntansi Sektor Publik. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang timbul dalam langgam sektor publik akan bisa memperkaya dan memperkuat khasanah kajian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.

Berbagai elaborasi dari berbagai permasalahan publik dalam Akuntansi Sektor Publik akan disajikan dalam buku ini secara komprehensif dengan para penulis yang ahli dalam bidangnya.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa yang ingin mendalami dan memahami Akuntansi Sektor Publik. Buku ini juga mengeksplorasi tentang topik-topik terkini dari Akuntansi Sektor Publik yang terus mengalami transformasi. Dengan terbitnya buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para pembaca untuk mengenal secara komprehensif tentang Akuntansi Sektor Publik.

Sementara dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian yang meliputi:

- Bab 1. Pengantar Akuntansi Sektor Publik
- Bab 2. Teori dan Konsep Akuntansi Sektor Publik
- Bab 3. Siklus Akuntansi Sektor Publik
- Bab 4. Konsep dan Pengertian Anggaran Sektor Publik
- Bab 5. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik
- Bab 6. Standar Akuntansi Sektor Publik
- Bab 7. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
- Bab 8. Pengukuran Kinerja di Pemerintahan
- Bab 9. Manajemen Keuangan Sektor Publik
- Bab 10. Pelaporan Keuangan Sektor Publik
- Bab 11. Memahami Basis Kas dan Basis Akrua pada Akuntansi Anggaran
- Bab 12. Analisis Investasi Publik
- Bab 13. Audit Akuntansi Sektor Publik
- Bab 14. Akuntansi Organisasi Nirlaba
- Bab 15. Akuntansi Entitas Partai Politik
- Bab 16. Akuntansi Desa



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/UTE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eureka.media.aksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ECC0202455196



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dewi Sartika, S.E., M.Sc. A.F.A.

Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.

Paskanova Christi Gainau, S.E., M.Ak.

Dr. Widhy Setyowati, M.M., Akt., CA.

Eliza Arshandy, S.E., M.Ak.

Dr. Rida Perwita Sari, S.E., M.Aks., Ak, CA, CPA, CIPSAS, CfrA.

Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd., M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP.,
CBPA., CPRW., CNPHRP., CSR.P., CLMA., CPFR.

Tuti Hermelinda, S.E., M.Ak.

Dr. Ana Sopanah, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.

Dr. Siska Aprianti., S.E., M.Si. Ak., CA. CSRA. CRP.

Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA.

Atik Andhayani, S.E., M.SA., CRA.

Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.

Berlian Afriansyah, S.Akt., M.Ak., CRA., CTRPSA.

Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA.

Sofyan Anshori, S.E., Ak., CA., M.M.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis : Dewi Sartika, S.E., M.Sc. A.F.A. | Rizky Ridwan, S.E., M.Ak. | Paskanova Christi Gainau, S.E., M.Ak. | Dr. Widhy Setyowati, M.M., Akt., CA. | Eliza Arshandy, S.E., M.Ak. | Dr. Rida Perwita Sari, S.E., M.Aks., Ak., CA., CPA., CIPSAS., CfrA. | Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd., M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP., CBPA., CPRW., CNPHRP., CSR., CLMA., CPFR. | Tuti Hermelinda, S.E., M.Ak. | Dr. Ana Sopanah, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA. | Dr. Siska Aprianti., S.E., M.Si. Ak., CA. CSRA. CRP. | Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA. | Atik Andhayani, S.E., M.SA., CRA. | Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak. | Berlian Afriansyah, S.Akt., M.Ak., CRA., CTRPSA. | Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA. | Sofyan Anshori, S.E., Ak., CA., M.M.

Editor : Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nur Aisah

ISBN : 978-623-120-811-8

No. HKI : EC00202455196

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik. Buku Akuntansi Sektor Publik menjadi sangat penting bagi para akademisi, peneliti, mahasiswa maupun publik dalam mengelaborasi berbagai permasalahan sektor publik yang berkorelasi dengan keilmuan akuntansi.

Dalam Akuntansi Sektor Publik, para pembaca akan diajak untuk bisa lebih memahami tahapan, prosedur standar dan penerapan ilmu akuntansi dalam sektor publik. Tanpa pemahaman yang baik dan benar, maka para pembaca akan sulit untuk bisa memahami berbagai teori, konsep dan permasalahan yang dihadapi dalam konteks Akuntansi Sektor Publik. Dengan demikian, arahan dalam buku ini akan mengajak para pembaca untuk bisa memahami alur teori dan penerapan Akuntansi Sektor Publik yang linier dengan permasalahan publik.

Pembahasan dalam buku ini sangat komprehensif, karena dimulai dari pengenalan teori dan konsep Akuntansi Sektor Publik, siklus Akuntansi Sektor Publik, jenis-jenis anggaran sektor publik, standar Akuntansi Sektor Publik, sistem dan pengukuran manajemen sektor publik, pengukuran kinerja pemerintahan. Selain itu buku ini juga akan menjelaskan tentang manajemen keuangan sektor publik, pelaporan keuangan sektor publik, memahami basis kas dan basis akrual pada akuntansi anggaran, analisis investasi publik, audit Akuntansi Sektor Publik, akuntansi organisasi nirlaba, akuntansi entitas partai politik hingga akuntansi desa.

Penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perkembangan keilmuan akuntansi di Indonesia, sekaligus bermanfaat bagi publik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Purbalingga, Mei 2024

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	1
Oleh : Dewi Sartika, S.E., M.Sc. A.F.A.	
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi, Ruang Lingkup, dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	2
C. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik.....	5
D. Persamaan dan Perbedaan antara Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	6
E. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Sektor Publik.....	11
F. Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik	13
DAFTAR PUSTAKA	15
TENTANG PENULIS.....	16
BAB 2 TEORI DAN KONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	17
Oleh : Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.	
A. Pendahuluan.....	17
B. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	19
C. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	22
D. Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	31
E. Value For Money	34
F. Kesimpulan	36
DAFTAR PUSTAKA	37
TENTANG PENULIS.....	38
BAB 3 SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	39
Oleh : Paskanova Christi Gainau, S.E., M.Ak.	
A. Pendahuluan.....	39
B. Tahapan Siklus Akuntansi Sektor Publik	40
C. Kesimpulan.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
TENTANG PENULIS.....	54

BAB 4	KONSEP DAN PENGERTIAN ANGGARAN	
	SEKTOR PUBLIK.....	55
	Oleh : Dr. Widhy Setyowati, M.M., Akt., CA.	
	A. Pendahuluan.....	55
	B. Aspek-Aspek Anggaran Sektor Publik	56
	C. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	58
	D. Jenis Anggaran Sektor Publik.....	60
	E. Persiapan Anggaran.....	61
	F. Siklus Penyusunan Anggaran.....	64
	G. Kebutuhan Anggaran Modal	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	TENTANG PENULIS	75
BAB 5	JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK	76
	Oleh : Eliza Arshandy, S.E., M.Ak.	
	A. Pendahuluan.....	76
	B. Anggaran Sektor Publik.....	77
	C. Jenis-jenis Anggaran	80
	D. Siklus Anggaran.....	81
	E. Sistematika Anggaran	83
	F. Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Sektor Publik	83
	G. Prinsip-prinsip dalam Penganggaran Sektor Publik	84
	H. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	85
	I. Kesimpulan.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	88
	TENTANG PENULIS	89
BAB 6	STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	90
	Oleh : Dr. Rida Perwita Sari, S.E., M.Aks., Ak., CA., CPA., CIPSAS., CfrA.	
	A. Pendahuluan.....	90
	B. Standar Akuntansi Publik	94
	C. Kesimpulan.....	106
	DAFTAR PUSTAKA.....	107
	TENTANG PENULIS	108

BAB 7	SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	109
	Oleh : Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd., M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP., CBPA., CPRW., CNPHRP., CSRP., CLMA., CPFR.	
	A. Pendahuluan.....	109
	B. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen.....	110
	C. Fungsi dan Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen ..	111
	D. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengendalian Manajemen.....	112
	E. Proses Pengendalian Manajemen.....	115
	DAFTAR PUSTAKA	123
	TENTANG PENULIS.....	127
BAB 8	PENGUKURAN KINERJA DI PEMERINTAHAN.....	128
	Oleh : Tuti Hermelinda, S.E., M.Ak.	
	A. Pendahuluan.....	128
	B. <i>Performance Measurement and Public Accountability</i>	130
	C. Mengukur Hasil, Manfaat dan Dampak	133
	D. Pengukuran <i>Value For Money</i>	135
	E. Penutup.....	139
	DAFTAR PUSTAKA	140
	TENTANG PENULIS.....	141
BAB 9	MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	142
	Oleh : Dr. Ana Sopanah, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.	
	A. Pendahuluan.....	142
	B. Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sektor Publik.....	146
	C. Lingkup Manajemen Keuangan Sektor Publik	147
	D. Perkembangan Sistem Manajemen Keuangan Sektor Publik.....	149
	E. <i>Good Governance</i> pada Sektor Publik.....	151
	F. BUMN, BUMD dan Badan Layanan Umum.....	153
	G. Laporan Keuangan Pemerintah.....	156
	DAFTAR PUSTAKA	161
	TENTANG PENULIS.....	163

BAB 10	PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.....	164
	Oleh : Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si. Ak., CA. CSRA. CRP.	
	A. Pendahuluan.....	164
	B. Pelaporan Keuangan Sektor Publik.....	164
	C. Kesimpulan.....	179
	DAFTAR PUSTAKA.....	180
	TENTANG PENULIS	181
BAB 11	MEMAHAMI BASIS KAS DAN BASIS AKRUAL PADA AKUNTANSI ANGGARAN	182
	Oleh : Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA.	
	A. Pendahuluan.....	182
	B. Basis Kas dan Basis AkruaI dalam Akuntansi Anggaran.....	183
	C. Kesimpulan.....	198
	DAFTAR PUSTAKA.....	200
	TENTANG PENULIS	201
BAB 12	ANALISIS INVESTASI PUBLIK.....	202
	Oleh : Atik Andhayani, S.E., M.SA., CRA.	
	A. Pendahuluan.....	202
	B. Faktor- Faktor Analisis Investasi Publik.....	203
	C. Penentuan Kebutuhan Investasi Publik	210
	D. Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik	211
	E. Kesimpulan.....	218
	DAFTAR PUSTAKA.....	219
	TENTANG PENULIS	220
BAB 13	AUDIT AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	221
	Oleh : Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.	
	A. Pendahuluan.....	221
	B. Audit Akuntansi Sektor Publik.....	224
	C. Kesimpulan.....	237
	DAFTAR PUSTAKA.....	239
	TENTANG PENULIS	240
BAB 14	AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA.....	241
	Oleh : Berlian Afriansyah, S.Akt., M.Ak., CRA., CTRPSA.	
	A. Pendahuluan.....	241
	B. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba.....	242
	C. Penerimaan dan Pemasukan Uang Kas	255

	DAFTAR PUSTAKA	263
	TENTANG PENULIS.....	264
BAB 15	AKUNTANSI ENTITAS PARTAI POLITIK.....	265
	Oleh : Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA.	
	A. Pendahuluan.....	265
	B. Akuntansi Entitas Politik.....	267
	C. Kesimpulan.....	276
	DAFTAR PUSTAKA	277
	TENTANG PENULIS.....	278
BAB 16	AKUNTANSI DESA.....	279
	Oleh : Sofyan Anshori, S.E., Ak, CA., M.M.	
	A. Pendahuluan.....	279
	B. Pendapatan Asli Desa	280
	C. Pendapatan Transfer Desa.....	283
	D. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa	300
	DAFTAR PUSTAKA	304
	TENTANG PENULIS.....	305

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Siklus Akuntansi Sektor Publik	39
Gambar 3.2.	Kerangka Inovasi dalam Perencanaan Publik	42
Gambar 3.3.	Siklus Penganggaran di Pemerintah Daerah	44
Gambar 3.4.	Turunan dalam Tahap Realisasi	45
Gambar 3.5.	Siklus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...	46
Gambar 3.6.	Siklus Penyusunan Laporan Keuangan Melalui Aplikasi	49
Gambar 3.7.	Siklus Penyusunan Laporan Keuangan Melalui Aplikasi	50
Gambar 3. 8.	Siklus Pertanggungjawaban Publik	51
Gambar 5.1.	Siklus Anggaran.....	82
Gambar 8.1.	Contoh indikator kinerja dan ukuran kinerja Program KPR Bersubsidi	131
Gambar 8.2.	Contoh indikator kinerja dan ukuran kinerja Program KPR Bersubsidi	135
Gambar 8.3.	Pengukuran Ekonomi	136
Gambar 8.4.	Pengukuran Efisiensi	137
Gambar 8.5.	Pengukuran Efektifitas.....	137
Gambar 8.6.	Contoh Pengukuran Kinerja Value For Money Program KPR Bersubsidi	138
Gambar 10.1.	Ilustrasi Hubungan Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.....	177
Gambar 10.2.	Ilustrasi Hubungan Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih.....	178
Gambar 14.1.	Hubungan dalam Persamaan Akuntansi	244
Gambar 14.2.	Siklus Akuntansi.....	246
Gambar 15.1.	Penyusunan Laporan Dana Kampanye.....	269
Gambar 15. 2.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye	270
Gambar 16.1.	Prosedur penerimaan pungutan dan sewa secara tunai.....	281
Gambar 16.2.	Prosedur penerimaan swadaya, partisipasi, dan gotong royong	283
Gambar 16.3.	Prosedur penerimaan pendapatan transfer dari Provinsi/Kabupaten/Kota.....	284
Gambar 16.4.	Alur persetujuan RAB.....	287

Gambar 16.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.....291

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta	10
Tabel 8.1.	Contoh Pengukuran <i>Input, Ouput, Outcome</i> dan <i>Impact</i> untuk Program Pemberantasan Penyakit Menular.....	135
Tabel 14.1.	Contoh Laporan Posisi Keuangan Organisasi Nirlaba	249
Tabel 14.2.	Contoh Laporan Aktivitas Organisasi Nirlaba	251
Tabel 14.3.	Contoh Laporan Arus Kas Organisasi Nirlaba	252
Tabel 16.1.	Format LRA APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.....	292
Tabel 16. 2.	Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.....	296
Tabel 16.3.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa X Tahun Anggaran 2022.....	301

BAB

1

PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dewi Sartika, S.E., M.Sc. A.F.A.
Universitas Teuku Umar

A. Pendahuluan

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awalnya, akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun, saat ini akuntansi sektor publik telah mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik sangat dekat dan dapat dilihat secara kasatmata. Institusi pemerintahan, partai politik, ta'mir masjid, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas adalah contoh organisasi sektor publik yang mudah ditemui di masyarakat. Organisasi tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan (*welfare*) masyarakatnya.

Saat ini, masyarakat (publik) memiliki tuntutan yang lebih besar untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor pemerintahan, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya. Publik, baik kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik, telah menaruh perhatian besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I, (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi ke-3, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, A & Kusufi, S, (2014), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, edisi ke-2, Salemba Empat, Jakarta.
- Jones, R & Pendlebury, M, (2010), *Public Sector Accounting*, 6th edition, Pearson Education, Canada.
- Mardiasmo, (2018), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi terbaru, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, D & Hertian, A, (2016), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ke-2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Siregar, B, (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

TENTANG PENULIS



Dewi Sartika, S.E., M.Sc. A.F.A.
Universitas Teuku Umar

Lahir di Sinabang pada tanggal 02 September 1988. Melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2007-2011 dan mengawali karir sebagai tenaga akuntan pada beberapa perusahaan jasa di Aceh hingga tahun 2013. Kemudian tahun 2014 beliau melanjutkan studi Master of Science di bidang akuntansi pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 2019 beliau aktif mengajar pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Selain mengajar, beliau juga mengambil peran sebagai *Journal Manager* pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan (Jimetera), Universitas Teuku Umar. Pada tahun 2021, beliau lolos sebagai salah satu penerima Program Hibah Dikti dan mengikuti sertifikat profesi internasional Accredited Financial Analyst (AFA) yang diselenggarakan oleh *American Academy Financial Management*. Minat penelitiannya meliputi konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Auditing, dan Analisis Laporan Keuangan yang telah dipublikasi pada beberapa jurnal nasional dan terakreditasi. Beliau juga telah menulis sebuah buku ajar berjudul “Manajemen Keuangan Daerah” sebagai referensi pada salah satu matakuliah yang beliau ampu.

BAB 2

TEORI DAN KONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.

Universitas Cipasung Tasikmalaya

A. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi sektor publik memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika perubahan dalam struktur pemerintahan, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kebijakan fiskal. Pada awalnya, sebelum munculnya praktik akuntansi sektor publik yang terstruktur, entitas publik lebih cenderung menggunakan pendekatan anggaran kas sederhana untuk mencatat transaksi keuangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pemerintahan dan ukuran sektor publik, kebutuhan akan sistem akuntansi yang lebih formal dan terstandarisasi pun muncul.

Globalisasi ekonomi juga memainkan peran dalam mengarahkan perkembangan akuntansi sektor publik. Standarisasi internasional melalui Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menyelaraskan praktik akuntansi sektor publik di seluruh dunia. Hal ini penting dalam memastikan konsistensi dan pemahaman yang sama dalam melaporkan kinerja keuangan pemerintah. Tantangan baru, seperti meningkatnya kompleksitas kebijakan publik, perubahan iklim, dan tekanan fiskal, menuntut adaptasi terus-menerus dalam praktik akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang evolusi ini menjadi kunci untuk memitigasi

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2014). Akuntansi Sektor Publik Edisi Dua. *Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. *Umsida Press*, 1-197.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

TENTANG PENULIS



Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.
Universitas Cipasung Tasikmalaya

Penulis lahir di Tasikmalaya, 16 Juli 1994, telah mencapai prestasi gemilang dan kini menjadi dosen tetap di Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Cipasung Tasikmalaya. Gelar S1 diperoleh dari Universitas Siliwangi dan S2 dari Universitas Widyatama, menunjukkan jejak intelektualnya yang kokoh. Dengan keahlian di akuntansi sektor publik, penulis aktif dalam pengajaran, riset, dan publikasi ilmiah. Dedikasinya tercermin dalam motivasinya yang tinggi, memberikan ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa dan rekan sejawat. Keberhasilannya adalah hasil dari semangat tak kenal menyerah dan komitmen pada pendidikan, membawa dampak positif dalam komunitas akademis, membentuk generasi penerus yang berkualitas. Dengan pengetahuannya yang mendalam, penulis tidak hanya mengajar, tetapi juga mendorong pertumbuhan intelektual dalam komunitas akademisnya, menjadikannya pilar inspiratif dalam dunia pendidikan tinggi.

BAB 3

SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Paskanova Christi Gainau, S.E., M.Ak.
Universitas Pattimura

A. Pendahuluan

Siklus akuntansi sektor publik merupakan mekanisme berulang yang terjadi di sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, partai politik, dan proyek-proyek kerjasama dengan pemerintah lainnya. Siklus ini terdiri dari tujuh (7) tahap antara lain perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik. Ketujuh siklus ini berlangsung secara terus-menerus dalam suatu jangka waktu tertentu.



Gambar 3.1. Siklus Akuntansi Sektor Publik

Sumber: (Bastian, 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Indra, B. (2010) '*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*', Edisi ke 3. Jakarta: Eirlangga. (BI)
- Mansyur, A. R. (2020) '*Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia*', *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, pp. 113-123.
- Satrio, A. A. (2023) '*Penganggaran Sektor Publik: Teori dan Implementasi di Indonesia. Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan*', Kementerian Keuangan Corporate University.
- Torfinng, J. (2018) '*Review : Cross-Sector Collaboration for Public Innovation Reviewed Work (s): Collaborative Innovation in the Public Sector*', in, pp. 0-3.
- Vigar, G., Cowie, P. and Healey, P. (2020) '*Innovation in planning: creating and securing public value*', *European Planning Studies*, 28(3), pp. 521-540. doi: 10.1080/09654313.2019.1639400.

TENTANG PENULIS



Paskanova Christi Gainau, S.E., M.Ak.
Universitas Pattimura

Penulis lahir di Ambon tanggal 16 April 1990. Penulis merupakan dosen tetap pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura. Pada tahun 2012 menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Selanjutnya, pada tahun 2014 menyelesaikan S2 pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis menekuni bidang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi untuk UMKM. Motivasi penulis adalah mengembangkan ilmu pengetahuan melalui hasil-hasil penelitian dan menyebarkan kepada sebanyak-banyaknya orang demi kemajuan peradaban pendidikan. Beberapa hasil penelitian penulis telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Salah satu buku yang pernah ditulis adalah *Esensi Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah*.

BAB 4

KONSEP DAN PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Dr. Widhy Setyowati, M.M., Akt., CA.
STIE Bank BPD Jateng

A. Pendahuluan

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Perencanaan merupakan hal penting, pengendalian memastikan pencapaian perencanaan. Anggaran memberikan tautan penting antara dua proses, perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran, dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik, yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program program yang dibiayai dengan uang publik, yang mencakup aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik.

Ditinjau dari kepentingannya, anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang dibuat, dalam negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki adalah uang rakyat dan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2000). *Public sector accounting*. Pearson Education.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mohammad Mahsun, (2006), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Nordiawan, D. (2010), *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, (2010), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

TENTANG PENULIS



Dr. Widhy Setyowati, M.M., Akt., CA.
STIE Bank BPD Jateng

Penulis lahir di Surabaya tanggal 3 Maret 1961. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga, dan S2 Program Magister Manajemen Universitas Airlangga, Program S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro. Saat ini Penulis menekuni bidang Auditing dan Perpajakan.

BAB 5

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Eliza Arshandy, S.E., M.Ak.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar

A. Pendahuluan

Proses penganggaran merupakan suatu proses penting yang sering kali menjadi perhatian bagi organisasi sektor publik terutama pemerintah. Berbeda dengan sektor swasta yang menempatkan penganggaran sebagai hal yang bersifat optimal, proses penganggaran di sektor publik, khususnya pemerintah, merupakan hal yang mutlak. (Deddi & Ayuningtyas, 2010). Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Dengan demikian penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (*unlimited demands*). Sementara itu anggaran merupakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang (Arfan *et al.*, 2018).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja (*output*) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Hal itu dikarenakan anggaran merupakan hasil kerja (*output*), maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sementara proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, I., Yamin, N. M., Azizul, K., Hamdani, & Putri, R. J. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (A. Firza (ed.); Edisi Revi). Madenatera.
- Deddi, N., & Ayuningtyas, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (A. Lulu (ed.); Edisi 2). Salemba Empat.
- Indra, B. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (S. Suryadi & Su. Yati (eds.)). Erlangga.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba* (Edisi 3). Andi.

TENTANG PENULIS



Eliza Arshandy, S.E., M.Ak.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar

Penulis bernama lengkap Eliza Arshandy, S.E., M.Ak. Lahir di Pematang Siantar tanggal 27 Mei 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi di STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Menyelesaikan S1 dan S2 pada jurusan Akuntansi. Motivasi penulis adalah ingin berkarya sebaik mungkin dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB 6

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dr. Rida Perwita Sari, S.E., M.Aks., Ak., CA., CPA., CIPSAS., CfrA.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

A. Pendahuluan

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*) untuk mencapai hasil tertentu yang memiliki manfaat. Akuntansi dapat digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik, sehingga keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Dari persepektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan akuntansi sektor publik sebagai pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik (Madjid, 2019).

Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengkomunikasian, dan penginterpretasian informasi keuangan tentang operasi pemerintah dan entitas publik lainnya. Akuntansi sektor publik merupakan pilar utama dalam pengelolaan sumber daya publik, yang memungkinkan adanya akuntabilitas dan penatalayanan atas dana publik, serta berkontribusi pada tata kelola yang baik. Akuntansi sektor publik merupakan teknis akuntansi dana masyarakat, artinya akuntansi yang diperuntukkan pada organisasi di sektor publik. Dengan demikian akuntansi sektor publik erat kaitannya

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Bastian, I. (2010). *Akunatnsi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.
- Madjid, J. (2019). *Akuntansi Sekor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Almada.

TENTANG PENULIS



Dr. Rida Perwita Sari, S.E., M.Aks., Ak., CA., CPA., CIPSAS., CfrA.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana dan Magister di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan Pendidikan Doktoral di Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu, penulis memiliki gelar profesi yang diakui secara nasional maupun internasional, misalnya ACCA dan ICMA Australia. Penulis aktif melakukan aktivitas tridharma perguruan tinggi dan sebagai praktisi dalam berbagai kegiatan profesi ilmiah, baik sebagai pengajar, pembimbingan mahasiswa, peneliti, narasumber di berbagai kegiatan ilmiah serta, pengurus organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd), IAI Jawa Timur, Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) serta sebagai asesor LAMEMBA dan BKD. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi sektor publik, auditing, Analisa laporan keuangan dan akuntansi biaya. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbudristek. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis: ridaps.ak@upnjatim.ac.id

BAB

7

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

**Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd., M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP.,
CBPA., CPRW., CNPHRP., CSR., CLMA., CPFR.**

Universitas Pelita Harapan Medan

A. Pendahuluan

Suatu organisasi yang melakukan berbagai kegiatan memulai kegiatannya dengan melaksanakan proses perencanaan. Perencanaan dilakukan melalui kegiatan individu untuk mencapai tujuan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang baik. Apa dan bagaimana sistem pengendalian manajemen serta cara kerjanya dibahas pada bab ini. Pembahasan dimulai dengan memahami keterbatasan sistem pengendalian manajemen dan fungsi perencanaan dan pengendalian lainnya, yaitu. perumusan strategi dan pengelolaan tugas, serta pengendalian itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, organisasi dan lembaga negara memerlukan pengelolaan biaya sosial dan ekonomi yang semakin efisien. Ketika tuntutan berbagai lembaga publik terhadap akuntabilitas publik semakin kuat, akuntansi manajemen sektor publik diakui sebagai ilmu manajemen keuangan publik. sektor swasta. Perbedaan ini tentu saja disebabkan karena selain adanya perbedaan karakteristik sektor publik, masing-masing sektor publik juga mempunyai standar sistem akuntansi tersendiri sehingga penerapannya memerlukan beberapa penyesuaian. Dengan kata lain, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan. organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Alviandre, Y. W., Isnaniati, S., & Kusumaningarti, M. (2023). Penentuan Biaya Pemeriksaan Dan Tarif Jasa Rawat Inap dengan *Metode Activity Based Costing* Pada Klinik Puri Husada Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3(2).
- Andriani, T., & Dahlia, L. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan ICT di Jakarta. *Relevan*, 4(1), 62-78.
- Anjarsari, N., Nurfadila, R., & Saldina, I. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Kedai Kopi Ledokan Di Binangun Blitar. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 24-39. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.419
- Arlita, D. S., Rahmadhanni, P., & Putra, P. E. (2021). Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing dalam Menentukan Harga Produksi pada Arief Gordyn. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2, 3982-3991.
- Fernanda, A. E., Yuliani, K., & Utomo, B. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Daya Saing. *Kinerja*, 18(3), 342-348. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Hananingrum, N., & Pravitasari, D. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajerial Pusat Biaya Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 61-78. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17101>
- Hasanah, A. U., & Saleh, S. A. (2021). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan *Activity-Based Costing System* Dalam Menentukan Harga Jual (Studi Kasus Pada CV Utama-Cimahi) Cost of Goods Sold Analysis Calculation Using

- Activity Based Costing System in Determining the Selling Price. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(01), 119-131.
- Herlinda, K., Wandari, A., Sujana, E., S, P. S., & Ekonomi, J. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Kab Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(1), 713-722.
- Jusmani, & Putra, A. E. (2020). Analisis Activity Based Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Perusahaan. *Jurnal Mediasi*, 3(1), 28-38.
- Lulu, D., & Rachman, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada PT . Taspen (Persero) KC Bogor. *Accounting Responsibility and Performance*, 8(1).
- Murhaban, & Adnan. (2020). *Sistem Pengendalian Manajemen*. [https://repository.unimal.ac.id/6166/1/BUKU SPM LENGKAP %28%29 compressor.pdf](https://repository.unimal.ac.id/6166/1/BUKU_SPM LENGKAP %28%29 compressor.pdf)
- Nurchahyo, A. B., Pangemanan, S. S., Pangerapan, S., Sam, U., & Manado, R. (2021). Penerapan Activity Based Costing Dalam Menentukan Harga Pokok Kamar Jle'S Hotel Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 228-234.
- Prayogi, J. (2021). Mengukur Kinerja Manajer Pusat Biaya Pada PT . Raisa Utama Medan. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(2), 374-386.
- Purba, S., Saragih, R., & Sihite, M. P. P. (2022). Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya Pada Rumah Sakit Umum Wilayah Tarutung. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 161-171. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4198>
- Rasyid, I. A., & Bramayudha, A. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen di LAZISNU Ranting Klampok di Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 3(1), 66-88. <https://doi.org/10.15642/jim.v3i1.995>

- Ridwan, N. F., & Suherman, A. (2021). Activity Based Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 10–16. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Rotinsulu, S. U., Runtu, T., & Mintalangi, S. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Jaya Bitung Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 147–156.
- Sagara, Y. (2021). Sistem Pengendalian Manajemen. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonociety.com/downloads/reports/Educati>
- Sani, C., & Andriany, Y. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Human Capital Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Karyawan Bidang Manajemen Keuangan PT. Semen Padang). *Pareso Jurnal*, 2(4), 269–290.
- Sari, M., & Herawati, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10, 1–19.
- Sharon, E., & Mintalangi, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1046–1057.
- Sondakh, B. A., Sabijono, H., & Gerungai, N. Y. T. (2023). Penerapan Activity Based Costing System Dalam Menghitung Harga Pokok Penjualan Pada CV. Verel Tri Putra Mandiri Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 282–291. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.49282>

- Syahputra, H. E. (2020). *Modul Sistem Pengendalian Manajemen*.
- Talia, D. M., & Affan, N. (2022). Analisis Penerapan Target Costing Dan Activity Based Costing Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Pengendalian Biaya Produk. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(3), 532-539. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11542>
- Tandiontong, M., & Lestari, A. (2011). Peranan Activity-Based Costing System Dalam Perhitungan Harga Pokok Terhadap Peningkatan Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada PT Retno Muda Pelumas Prima Tegal). *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(5), 1-27.
- Taroreh, V., Sondakh, J. J., & Maradesa, D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. Pos Indonesia, Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 82-89. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.49134>
- Ulfa, M. (2020). Tinjauan Manajemen Pada Unsur Pengendalian Terkait Masalah Etos Kerja di Puskesmas Lappae Kecamatan Tellulimpoe. *Program Studi Ekonomi Syariah (EKOS) Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai*, 1-128.
- Wardi, J. (2018). Peran Kepemimpinan Dalam Kinerja Organisasi Melalui Sistem Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1829), 42.
- Wijaya, R. S. (2022). Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Penelitian pada PT Semen Padang, Lubuk Kilangan, Padang). *MENARA Ilmu*, XVI(01), 70-78.

TENTANG PENULIS



**Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd., M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP.,
CBPA., CPRW., CNPHRP., CSRP., CLMA., CPFR.**
Universitas Pelita Harapan Medan

Penulis dilahirkan di Medan, 27 Agustus 1978 lulusan Akuntansi dari Universitas Methodist Indonesia, Medan, pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan S-2 program Pascasarjana Magister Sains Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Negeri Medan dan menyelesaikannya pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 mengikuti perkuliahan di PPAK USU dan telah menyelesaikan pada tahun 2016. Dan sekarang ini lagi kuliah doktoral (S3) di Kampus Universitas Negeri Medan dan juga dosen tetap di Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan pada jurusan Akuntansi. Penulis juga pernah mempresentasikan artikel di Fakultas Bisnis - Unika Widya Mandala Surabaya pada kegiatan *The 9th NCFB 2016 and Doctoral Colloquium 2016*, Selain itu mempresentasikan artikel di Universitas Indonesia (FEB UI) tanggal 2 - 3 Agustus 2017 pada kegiatan *International Conference And Doctoral Colloquium In Finance 2017 (The 3rd IFA Annual Conference)*. Penulis ada publikasinya di jurnal internasional hingga sekarang. Penulis pernah meraih Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan pada tahun 2016. Beliau juga reviewer di beberapa jurnal seperti Jurnal Owner Riset dan Jurnal Akuntansi, Jurnal Jesya dan Jurnal LLDIKTI - 1 , Jurnal Jebma, Jurnal Auditing dan Perpajakan. Pada tahun 2021, artikel penulis lolos seleksi pada kegiatan Simposium Nasional Akuntansi ke - 24 di Jambi dan Pada tahun 2022, artikel penulis lolos seleksi pada kegiatan SNA ke - 25 di Makasar. Email Penulis: *hantono_78@yahoo.com*

BAB 8

PENGUKURAN KINERJA DI PEMERINTAHAN

Tuti Hermelinda, S.E., M.Ak.
Politeknik Raflesia

A. Pendahuluan

Kinerja buruk sektor publik telah menjadi sesuatu yang umum yang dimulai dari proses birokrasi yang rumit atau pungutan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Hal ini sudah biasa terjadi terutama di negara-negara berkembang dengan mendorong munculnya manajemen berbasis kinerja (*Performance-based-management*) yang merupakan bagian dari reformasi *New Public Management* yang diadopsi oleh negara-negara maju di Eropa dan Anglo-Amerika sejak tahun 1980-an. Manajemen berbasis kinerja berfokus pada pengukuran hasil daripada hanya fokus pada keluaran semata. Diperlukan penegasan bahwa pemahaman tentang pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya sampai pada level permukaan dan tidak menyentuh bagian dasar organisasi, tetapi juga mencakup hingga ke tingkat terendah di dalamnya.

Beberapa teori yang muncul dalam pendekatan manajemen berbasis kinerja antara lain adalah model *Classical Organization Theory*, *Scientific Management*, *Performance Budgeting*, *Zero Based Budgeting*, *Management By Objective (MBO)*, *Management By Result*, *Program Evaluation*, dan *reinventing goverment* (Davis & larkey, 1980; Orsborne & Gaebler, 1992). Transformasi menuju era berbasis kinerja ini adalah bagian dari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., & Kusufi, S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi. *Salemba Empat: Jakarta*.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. *Jakarta: Erlangga*.
- Erlina, R. (2013). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. *Penerbit Brama Ardian*.
- Halim, A. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, R. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. P., & Prabu, A. (2010). Evaluasi Kinerja SDM, PT. *Refika Aditama, Bandung*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). Akuntansi Sektor Publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Ramdhani, A. (2011). Penilaian Kinerja. *Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa*.
- Tanjung, A. H. (2014). Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. *Yogyakarta: BPFE UGM*.

TENTANG PENULIS



Tuti Hermelinda, S.E., M.Ak.
Politeknik Raflesia

Penulis lahir di Curup tanggal 28 Mei 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Di Politeknik Raflesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.

BAB 9

MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Dr. Ana Sopanah, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
Universitas Widyagama Malang

A. Pendahuluan

Sebelum membahas lebih jauh tentang manajemen keuangan sektor publik berikut sekilas sejarah perkembangannya. Manajemen keuangan sektor publik sangat dipengaruhi oleh dua aliran (mazhab) (Bastian, 2021). Kedua aliran tersebut di antaranya:

1. Aliran Napoleon atau yang terkenal dengan nama mazhab latin. Pada mazhab ini lebih menekankan akan pentingnya sebuah perencanaan anggaran.
2. Aliran Anglosaxon atau dengan nama lain mazhab nordis atau mazhab eropa utara. Pada mazhab ini lebih menekankan pada hasil akhir yang mengacu pada standar pelaporan keuangan sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumber dana yang digunkakan.

Kedua aliran (*mahzhab*) tersebut sangat penting pengaruhnya termasuk di Indonesia. Awalnya di Indonesia menganut mahzab Napoleon pada tahun 1964 pada saat ini diberlakukannya peraturan *Indische Compatible Wet* (ICW). ICW adalah suatu perundang-undangan yang mengatur tentang perbendaharaan jaman Belanda yang kemudian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Dengan berjalannya waktu ICW kemudian diganti dengan undang-undang baru yakni UU No. 9 tahun 1968 tentang perubahan tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). Enomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(7), 856-865. <https://doi.org/10.36418/covalue.v14i7.3957>
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Andi.
- Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15(3), 135-149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A. N., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16(1), 95-101. <https://doi.org/10.31940/jbk.v16i1.1597>
- Maslika, Sopanah, A., & Prawestri, H. P. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang* Conference on Economic and Business Innovation (CEBI),
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1598-1609.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*.
- Rivan, A., & Maksun, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 92-100. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Rusdianti, I. S., Irmadariyani, R., & Kustono, A. S. (2022). E-Finance : Mitigation of Fraud Tendency in Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 5(2), 574-582. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i3.1857>

- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-12.
- Sopannah, A., Fatoni, I., Danawanti, M. O., Harmadji, D. E., Mulia, E., Puspitosarie, E., Sari, Y. P., Zamzami, F., Faiz, I. A., Huda, I., Setiawan, A. R., Ulfah, A. K., & Arifin, J. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopannah, A., & Harnovinsah. (2023). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Implementasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopannah, A., Hasan, K., Putra, S. K., & Rusdianti, I. S. (2023). *Akuntabilitas publik organisasi nirlaba*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopannah, A., Sodik, M., Gunarianto, Bahri, S., & Puspitosarie, E. (2023). Public participation in budgeting practices in village government. *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, 1, 93-102. <https://doi.org/10.20885/InCAF.vol1.art11>
- Sulaiman, A. (2023). *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni.
- Zein, H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

TENTANG PENULIS



Dr. Ana Sopanah, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
Universitas Widyagama Malang

Penulis adalah Dosen di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyagama Malang. Menyelesaikan Program S 1 Akuntansi di Universitas Widyagama Tahun 1997 dan Master of Science (M.Si) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2001, Pendidikan Profesi Akuntan di Tempuh di STIE Malang Kucecwara Tahun (2013), dan ketiganya dengan Predikat Cumlaude, Pada tahun 2013 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang. Selain menjadi Dosen, Ana juga aktif di berbagai organisasi profesi dan terlibat langsung sebagai pengurus di dalamnya. Seperti, Forum Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (FAME), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP), Certified Management Accountant Indonesia (CMA), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

BAB 10 | PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Dr. Siska Aprianti., S.E., M.Si. Ak., CA. CSRA. CRP.
Politeknik Negeri Srwijaya

A. Pendahuluan

Wujud akuntabilitas organisasi publik kepada *stakeholder* dapat dilacak dari entitas publik yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada *stakeholder*. Adanya pelaporan keuangan organisasi publik yang transparan diharapkan mampu menekan tindakan manipulasi atas penggunaan aset dan keuangan yang merugikan negara. Hal itu dikarenakan keberadaan laporan keuangan di organisasi publik mampu memprediksi kualitas dan aneka sumber daya dalam meminimalisir risiko ketidakpastian lingkungan. Bagian ini akan menguraikan maksud dan tujuan laporan keuangan sektor publik, asumsi dasar, karakteristik dan komponen pelaporan keuangan dalam organisasi publik.

B. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

1. Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada sektor publik menggambarkan posisi keuangan atas transaksi yang dilakukan entitas publik (Bastian, 2011). Pelaporan ini terdiri dari 2 jenis yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja menggambarkan pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang melibatkan sumber daya yang digunakan baik oleh pemerintah pusat atau daerah, unit kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. 3rd edn. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2011) *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. 2nd edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. and Kusufi, M.S. (2012) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. 4th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Masnila, N. (2021) *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. 1st edn. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media.

TENTANG PENULIS



Dr. Siska Aprianti., S.E., M.Si. Ak., CA. CSRA. CRP.
Politeknik Negeri Srwijaya

Lahir di Palembang tanggal 10 April 1978, telah menyelesaikan studi Doktoral di Universitas Sriwijaya Palembang pada Jurusan Ekonomi Kekhususan Akuntansi Keuangan tahun 2023. Saat ini penulis merupakan salah satu dosen tetap di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Srwijaya, yang telah mengabdikan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang pernah diajarkan meliputi Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Perbankan dan Akuntansi Koperasi. Penulis pernah mengikuti beberapa pelatihan sertifikasi seperti *Certified Sustainability Reporting Specialist* tahun 2020, *Certified Sustainability Reporting Assurer* tahun 2021, *Certified Risk Professional* tahun 2022. Penulis juga pernah menjadi narasumber pada kegiatan Akuntansi BUMDes bagi pengurus BUMDes Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.

BAB 11

MEMAHAMI BASIS KAS DAN BASIS AKRUAL PADA AKUNTANSI ANGGARAN

Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA.
Politeknik Negeri Sriwijaya

A. Pendahuluan

Dalam sistem pengelolaan keuangan sebuah entitas, baik itu perusahaan, organisasi nirlaba, atau pemerintahan, akuntansi anggaran adalah komponen penting. Akuntansi anggaran merupakan proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan organisasi atau entitas dalam konteks anggaran. Dengan kata lain akuntansi anggaran merupakan salah satu alat penting dalam manajemen keuangan yang membantu organisasi atau entitas merencanakan, mengendalikan, dan melaporkan bagaimana dana digunakan untuk mencapai tujuan. Hal ini mencakup perencanaan, pengawasan, dan pengawasan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntansi anggaran dalam sektor publik sering terkait dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur agar dana digunakan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Akuntansi anggaran dalam sektor publik sering terkait dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang dana yang digunakan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam akuntansi anggaran yang dilaksanakan, dan dipantau dapat dipengaruhi oleh dengan menggunakan basis kas atau basis akrual. Beberapa pemerintah atau organisasi mungkin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., & Kusufi, S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi. *Salemba Empat: Jakarta*.
- Anthony, R. N., Hawkins, D. F., & Merchant, K. A. (2007). Accounting: text and cases. *Language*, 26(933p), 25cm.
- Hornngren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2005). *Introduction to Management Accounting, Chap. 1-14*. Pearson Educación.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Guan, L. (2006). Cost management: Accounting and control. *Mason: Thomson South Western Inc*.
- Rambe, O. S., & Sakti, O. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik.

TENTANG PENULIS



Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA.
Politeknik Negeri Sriwijaya

Penulis lahir di Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro, 23 Mei 1982. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Kota Yogyakarta lulus tahun 2004. Pendidikan S2 Master Of Sains In Accounting, lulus tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi Bidang Kekhususan Akuntansi Keuangan di Universitas Sriwijaya, Kota Palembang. Penulis menjadi Dosen Jurusan Akuntansi sejak tahun 2004 di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Lampung. Dari tahun 2014 sampai dengan saat ini, menjadi Dosen Program Studi Akuntansi Sektor Publik di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.

BAB 12

ANALISIS INVESTASI PUBLIK

Atik Andhayani, S.E., M.SA., CRA.
Politeknik Negeri Malang

A. Pendahuluan

Pemerintah menanamkan modal untuk pembangunan dengan dukungan komunitas atau program tertentu bertujuan memulihkan dan meningkatkan ekonomi serta mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikenal sebagai investasi publik. Dengan kata lain investasi terkait dengan anggaran modal untuk proyek pemerintah. Pemerintah melakukan investasi dalam membangun infrastruktur sektor publik seperti jalan tol atau kereta listrik, dan juga dapat berinvestasi dalam membangun dan mengembangkan tempat wisata serta fasilitas umum lainnya seperti mesin atau gedung. Pemerintah melakukan investasi publik, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan menekan tingkat pengangguran. Investasi pemerintah juga dapat didefinisikan sebagai penempatan dana atau barang jangka panjang berupa oleh pemerintah pusat, termasuk surat berharga dan investasi.

Pihak yang berhubungan dengan investasi yaitu operator investasi pemerintah (OIP) ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk mengelola investasi pemerintah dengan investasi jangka panjang dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Hukum Lainnya (BHL) milik pemerintah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial, atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Umsida Press*, 1-197.
- Ekowati, T., Sumarjono, D., & Setiadi, A. (2020). *Buku Ajar Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek*.
- Martini, E. S. (2012). *Mencermati Resiko Investasi*. Semnas Fekon.
- Massie, N. I. K., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Pengendalian Biaya Produksi untuk Menilai Eisiensi dan Efektivitas Biaya Produksi. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Muwarni, A. S. (2011). Analisis Investasi Sektor Publik. *Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akutansi*, 14(1).
- Nuzula, N. F., & Nurlailly, F. (2020). *Dasar-dasar manajemen investasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Raysalefty, E. N., & Helmina, M. R. A. (2022). Usaha Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berdasar Analisis Kelayakan Investasi Dalam Belanja Modal. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 10(1).
- Sinaga, J. (2017). Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 164-178.
- Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 41-46.
- Syafarudin, D., & Sugiat, J. (2019). Kajian Evaluasi Kinerja Investasi Kabupaten Garut. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 110-118.
- Yuanita, D. W., Dewi, C. N., & Setyowati, S. M. (2023). Kinerja dan Investasi Sektor Publik sebagai Bentuk Pelayanan Daerah: Sebuah Telaah Pustaka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 23-33. <https://doi.org/10.32639/jiak.v12i1.27>

TENTANG PENULIS



Atik Andhayani, S.E., M.SA., CRA.

Politeknik Negeri Malang

Penulis lahir di Malang, Jawa Timur 3 Mei 1975. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi ditempuh di Universitas Merdeka Malang Jawa Timur, lulus tahun 1998. Pendidikan S2 Akuntansi, lulus tahun 2012 di Fak. Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang. Saat ini sedang menempuh S3 Akuntansi -PDIA di Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman bekerja di Kantor Akuntan Publik Wiyoko Suwandi Malang sejak tahun 1998 sampai 2008. Kemudian menjadi PNS di Pemerintah Kota Batu sejak 2007 sampai 2020. Mengajar pada jurusan Akuntansi di Universitas Kanjuruhan Malang sejak 2012 sampai 2017. Dosen Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Malang sejak 2017. Email: atik.andhayani@polinema.ac.id

BAB 13

AUDIT AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.
Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

A. Pendahuluan

Di tengah dinamika pemerintahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, audit sektor publik menjadi landasan utama dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Sebagai alat penting untuk menilai kinerja lembaga publik, audit sektor publik muncul sebagai pilar yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Audit merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara objektif untuk menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang terkait dengan asersi mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi. Proses ini bertujuan untuk memastikan tingkat korelasi yang tepat antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam melakukan audit, pendekatan yang sistematis dan obyektif menjadi landasan utama guna menilai keandalan dan keabsahan informasi keuangan, operasional, dan non-keuangan suatu entitas. Aspek objektivitas menjadi unsur kritis, sehingga auditor bertindak independen untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan bersifat bebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengarahkan penilaian ke arah yang tidak obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Vol. 3). Erlangga.
- Bastian, I. (2018). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan Edisi 3*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Edisi 2* (Vol. 2). Salemba Empat.
- Malta, Y. A., & Rusdianti, I. S. (2023). Analysis of SAKTI Implementation on the Quality of Management of Fixed Assets in the Religious High Court of Jayapura. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, Vol. 2(2), 55-62. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i2.42>
- Pradesa, H. A., Agustina, I., Sulistyan, R. B., & Rusdianti, I. S. (2023). Studi Empiris Tentang Kompetensi Auditor Dalam Melakukan Fungsi Audit Internal Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 81-91. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.08>
- Rusdianti, I. S., Irmadariyani, R., & Kustono, A. S. (2022). E-Finance: Mitigation of Fraud Tendency in Indonesia. *IJEBD International Journal Of Entrepreneurship And Business Development*, 5(3), 581-589. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i3.1857>
- Rusdianti, I. S., & Sopanah, A. (2023). *Mengenal Akuntansi Publik dan Perkembangannya* (Vol. 1). Scopindo Media Pustaka.
- Sopanah, A., Hasan, k., Putra, S. K., & Rusdianti, I. S. (2023). *Akuntabilitas Publik Organisasi Nirlaba*. Scopindo Media Pustaka.

TENTANG PENULIS



Imanita Septian Rusdianti, S.Ak., M.Ak.

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Penulis merupakan Dosen pendatang baru. Imanita mengawali karir menjadi seorang dosen pada tahun 2022, tepatnya bulan Oktober setelah berhasil menyelesaikan studi S2 Magister Akuntansi Universitas Negeri Jember di tahun 2022 dengan predikat Cumlaude. Menyelesaikan Program S1 Akuntansi di STIE Widyagama Lumajang Tahun 2018. Motivasi Imanita yaitu menuangkan ide, berbagi ilmu dan berkontribusi dalam kebermanfaatan karya tulis akuntansi. Imanita juga berkolaborasi dalam penyusunan buku ajar, bunga rampai, buku monograf dan beberapa buku antologi.

BAB 14

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

Berlian Afriansyah, S.Akt., M.Ak., CRA., CTRPSA.
Politeknik Raflesia

A. Pendahuluan

Sektor pemerintah dan nirlaba saling terkait dengan sektor lain dan memiliki dampak pada perekonomian. Dalam organisasi nirlaba, akuntansi penting untuk memberikan informasi yang terus-menerus tentang aktivitas organisasi, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran dan informasi berkala tentang tujuan organisasi telah tercapai. Organisasi nirlaba non-pemerintah harus mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional, serta memberikan reputasi yang baik bagi negara. Dalam konteks ini, laporan keuangan berperan sebagai mekanisme umpan balik kepada pemerintah. Prestasi organisasi nirlaba tidak selalu bisa diukur dengan uang. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk memberikan informasi kepada para penyedia sumber daya dan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam penggunaan sumber daya untuk organisasi nirlaba tersebut.

Departemen Keuangan RI telah mengeluarkan keputusan untuk membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAKPPD). Organisasi ini tidak sama dan terpisah dari Komite Standar Akuntansi Keuangan-

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di pemerintah daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Erlina, R. (2013). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. *Penerbit Brama Ardian*.
- Halim, A. (2010). Akuntansi daerah sektor publik. *Jakarta: Salemba, 4*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hery, S. E. (2023). *Teori akuntansi: Pendekatan konsep dan analisis*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP.
- Tanjung, A. H. (2014). Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. *Yogyakarta: BPFE UGM*.
- Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2017). *akuntansi pengantar 1*. ugm press.

TENTANG PENULIS



Berlian Afriansyah, S.Akt., M.Ak., CRA., CTRPSA.
Politeknik Raflesia

Penulis lahir di Curup tanggal 23 Aril 1989, Lulus D3 Program Studi Akuntansi, S1 Akuntansi pada tahun 2013, S2 pada Program Studi Akuntansi pada tahun 2017 dan saat ini sedang menempuh Doctor ilmu ekonomi. Saat ini sebagai dosen tetap pada program studi Akuntansi di Politeknik Raflesia dan dosen tidak tetap pada beberapa universitas. Sejak Tahun 2019 sampai awal 2023 menjadi Tenaga Ahli DPR RI yang membidangi Pendidikan/Komisi X DPR RI, Penulis Aktif menulis artikel, berbagai jurnal ilmiah, sebagai narasumber dan beberapa seminar akuntansi.)

BAB 15

AKUNTANSI ENTITAS PARTAI POLITIK

Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

A. Pendahuluan

Akuntansi partai politik adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan partai politik. Informasi keuangan tersebut meliputi sumber dan penggunaan dana, aset, kewajiban, dan ekuitas. Akuntansi partai politik bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dan transparan bagi para pemangku kepentingan, seperti pengurus partai politik, anggota partai politik, pemerintah, donatur, kreditor, dan masyarakat luas. Di Indonesia, akuntansi partai politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 37 ayat (1) UU tersebut dengan pernyataan bahwa partai politik wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Laporan keuangan mengharuskan ditata sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Akuntansi partai politik merujuk pada pelaporan keuangan dan pengawasan transaksi yang dilakukan oleh partai politik. Di negara Indonesia, standar akuntansi keuangan partai politik diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PSAK) 45/2002 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35/2020. Tujuan dari akuntansi partai politik adalah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan partai politik. Perlu diketahui bahwa negara-negara

DAFTAR PUSTAKA

- Doublet, Y.-M. (2012) 'Fighting Corruptpion. Political funding', p. 55.
- Ekonomi, Dekan Fakultas *et al.* (2022) *S u r a t t u g a s*.
- Junaidi, V. *et al.* (2011) *Anomali Keuangan Partai Politik : Pengaturan dan Praktek*.
- Maulana, I. and Nugraheni, B. L. Y. (2022) 'Kajian Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik di Indonesia', pp. 1-61.

TENTANG PENULIS



Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung sejak tahun 2019 dengan bidang Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Biaya, Auditing dan Akuntansi Sektor Publik. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya nasional maupun internasional dan menjadi anggota organisasi profesi dan akademik di bidang Akuntansi dan Pajak. Email: proficiatmelsi@gmail.com

BAB 16 | AKUNTANSI DESA

Sofyan Anshori, S.E., Ak., CA., M.M.
Universitas Mercu Buana

A. Pendahuluan

Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa disusun dalam suatu APBDesa. Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APBDesa berarti pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD) yaitu rekening tempat menyimpan uang atau pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui bank. Namun bagi desa yang belum menerima layanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam peraturan kepala daerah (Perkada) mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam Perkada tersebut juga diatur mengenai batasan uang kas yang dapat disimpan oleh bendahara desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Transparan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B., & Bakthiar, R. (2023). Effective Strategies for Preventing Bribery on Village Fund Management in Pandeglang Regency. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 12(1), 83-103.
- Handayani, B., & Arianto, B. (2022). Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Tata Kelola Dana Desa. *Jurnal DIALOGIKA: Manajemen dan Administrasi*, 3(2), 59-72
- Arianto, B. (2023a). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 30-38.
- Arianto, B. (2023b). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106-127.

TENTANG PENULIS



Sofyan Anshori, S.E., Ak., CA., M.M.
Universitas Mercu Buana

Lahir di Biak, 17 Nopember 1974. Penulis lulus Sarjana Akuntansi (S.E., Ak.) di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2001, dilanjutkan dengan Pendidikan Program Magister Ilmu Manajemen (MM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (UMB) diraih pada tahun 2011. Sejak tahun 2017 sampai sekarang penulis mengabdikan pada Kampus yang berada di Kota Jakarta yaitu Universitas Mercu Buana dan Universitas Terbuka. Sebagai salah satu penulis dalam buku ini, saya berharap besar semoga buku ini memiliki manfaat yang besar khususnya untuk para mahasiswa dan rekan akademisi yang menggeluti bidang Ilmu Manajemen.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202455196, 26 Juni 2024

Pencipta
Nama : **Dewi Sartika, Rizky Ridwan dkk**
Alamat : Dusun Mulia Jaya, RT 000 RW 000, Desa Simpang Jaya, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, 23664, Tadu Raya, Nagan Raya, Di Aceh, 23664
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dewi Sartika, Rizky Ridwan dkk**
Alamat : Dusun Mulia Jaya, RT 000 RW 000, Desa Simpang Jaya, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, 23664, Tadu Raya, Nagan Raya, Di Aceh, 23664
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Akuntansi Sektor Publik**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 Juni 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000630558

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAHI
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.